



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KOORDINASI BADAN LEGISLASI
DENGAN MENKUMHAM DAN DPD RI DALAM RANGKA
PENYUSUNAN PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2019**

TANGGAL 23 OKTOBER 2018

Tahun Sidang : 2017– 2018
Masa Persidangan : I
Rapat ke : 14 (empat belas).
Jenis rapat : Rapat Koordinasi
Hari/tanggal : Selasa, 23 Oktober 2017.
Pukul : 14.05 WIB s/d 15.08 WIB.
Tempat : R. Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt.1.
Acara : Pembahasan Usulan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019.
Ketua Rapat : H. Totok Daryanto, SE
Sekretaris : Widiharto, SH., MH.
Hadir : - 28 orang, izin 5 orang dari 74 orang Anggota.
- Menkumham beserta jajaran;
- Pimpinan Panitia Perancangan UU DPD RI beserta jajaran;

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Koordinasi Badan Legislasi dengan Menkumham dan DPD RI dalam rangka pembahasan usulan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019, dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, SE.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.05 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan menyampaikan usulan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019 dari DPR RI serta mempersilahkan bagi Pemerintah dan DPD RI untuk menyampaikan usulannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Ketua Rapat menyampaikan beberapa hal terkait dengan evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 dan usulan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1.1. Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 sebanyak 50 (lima puluh) RUU.

1.2. Dari 50 (lima puluh) RUU yang disiapkan oleh DPR, terdiri dari :

- a. RUU yang telah disahkan menjadi UU : 5 RUU;
- b. RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I : 27 RUU;
- c. RUU Menunggu Surpres : 10 RUU;
- d. RUU selesai Harmonisasi : 1 RUU;
- e. RUU dalam Proses Harmonisasi : 2 RUU;
- f. RUU dalam Proses Penyusunan : 5 RUU.

2. Mengingat hasil pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 yang belum maksimal, Badan Legislasi berketetapan agar penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019 dapat dibahas dengan lebih mendalam.

3. Berdasarkan Surat yang masuk, sampai saat ini Badan Legislasi telah menerima usulan RUU baru yang berasal dari Komisi, Fraksi, dan masyarakat sebanyak 22 (dua puluh dua) RUU, 10 (sepuluh) RUU diantaranya merupakan RUU usulan baru yang belum masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

4. Badan Legislasi mengusulkan beberapa parameter dalam menentukan RUU yang dapat masuk pada Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 yaitu :

- a. RUU yang masih dalam tahap Pembicaraan Tk. I;
- b. RUU sudah selesai/dalam tahap harmonisasi;
- c. RUU sedang dalam tahap penyusunan yang sudah siap draft RUU dan NA;
- d. RUU baru yang memenuhi kriteria urgensi tertentu.

B. Masukan/pandangan dari Pemerintah terkait dengan usulan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019, sebagai berikut :

1. Pemerintah sependapat dengan DPR terkait dengan evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 yang tidak memuaskan.

2. Sehubungan dengan hal tersebut untuk Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019, Pemerintah mengusulkan 17 (tujuh belas) RUU yang terdiri dari :

- 12 RUU luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018;

- 4 RUU baru yang berasal dari Prolegnas RUU Tahun 2015-2019; dan
- 1 RUU untuk dapat masuk dalam Prolegnas RUU Tahun 2015-2019.

C. Masukan/pandangan dari DPD RI terkait dengan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019, sebagai berikut :

1. Persoalan minimnya kuantitas legislasi yang dihasilkan ini selalu terulang dari setiap tahun ke-tahun dan tentunya ini menggambarkan bahwa terdapat masalah yang terjadi dalam sistem perencanaan program legislasi serta realisasi dari program legislasi tersebut.
2. Kiranya tidak perlu memaksakan untuk memasukkan daftar RUU yang begitu banyak dalam Prolegnas yang pada akhirnya menyebabkan makna prioritas menjadi sumir dan memberi kesan bahwa RUU prioritas tahunan hanya bersifat menampung usulan saja tanpa ada parameter yang jelas tentang prioritas kebutuhan bangsa dalam bidang legislasi
3. sesuai dengan aspirasi daerah yang kami terima, pada tahun 2019 kami mengusulkan 6 (enam) buah RUU yang sudah menjadi *long list* Prolegnas 2015-2019 dan 3 (tiga) RUU yang merupakan luncuran dari Prioritas Tahun 2018 yaitu RUU tentang Wawasan Nusantara, RUU tentang Ekonomi Kreatif, dan RUU tentang Daerah Kepulauan.
4. Adapun 6 (enam) RUU yang kami usulkan tersebut yaitu:
 - RUU tentang Pengelolaan Kawasan Daerah Perbatasan;
 - RUU tentang Kegeologian;
 - RUU tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
 - RUU tentang Bahasa Daerah;
 - RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah; dan
 - RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
5. Mengharapkan pertemuan konsultasi dalam forum rapat kerja ini dapat berjalan secara konstruktif dan dinamis dan dapat menghasilkan hal-hal yang positif bagi kemajuan legislasi nasional

D. Tanggapan/pandangan Anggota Badan Legislasi terkait dengan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019, sebagai berikut :

1. Mengharapkan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tetap masuk di dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019.

2. Mengusulkan untuk RUU tentang Permusikan dapat masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019 dan dapat diselesaikan pada tahun 2019.
3. Memberikan dukungan atas masuknya RUU tentang Pertahanan Siber Nasional.
4. Mengusulkan untuk dapat melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya terkait dengan penambahan pengaturan mengenai dapat dilakukannya *carryover* daftar Prolegnas yang dalam pembahasan oleh DPR pada periode berikutnya.
5. Diharapkan agar dalam penyusunan Prolegnas di Tahun 2019 nanti dapat dilakukan secara realistis atas kemampuan dan waktu yang dimiliki oleh Anggota DPR Periode ini.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Koordinasi Badan Legislasi bersama dengan Pemerintah dan DPD RI terkait dengan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019 menyepakati/menyetujui beberapa hal sebagai berikut :

1. Menerima usulan DPR, Pemerintah, dan DPD untuk dibahas lebih mendalam di tingkat Panja yang akan dipimpin oleh Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
2. Rapat Panja akan dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2018.

Rapat ditutup pukul 15.08 WIB.

Jakarta, 23 Oktober 2018

AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS



WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001